

## ABSTRAK

### **AIS SURASA. “Penjatuhan Pidana Di Bawah Batas Minimum Pada Tindak Pidana Gratifikasi Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan.”**

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa penjatuhan pidana di bawah sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dalam hal ini khusus mengenai gratifikasi padadasarnya tidan dibenarkan berdasarkan pasal 12B dan 12C. Namun, pada faktanya hakim banyak menjatuhkan sanksi pidana di bawah minimum khusus seperti pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor.1136.K/PID.SUS/2012 dalam penelitian ini. Hal ini dipandang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memberi efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi.

Tujuan Penelitian ini terfokus pada : bagaimana alasan yuridis penjatuhan sanksi di bawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dan bagaimana akibat hukum jika putusan hakim dijatuhkan di bawah sanksi pidana minimum khusus.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini mempergunakan sumber data primer yaitu hasil pengamatan langsung dan wawancara kepada nara sumber yang memiliki kompetensi dalam masalah yang berkaitan dengan pengaruh tuntutan pidana terhadap Hakim dalam penjatuhan pidana dan tujuan pemidanaan dan sumber data sekunder yaitu mencakup data hukum primer, hukum sekunder, dan data hukum tersier. Teori pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan tiga teori, yaitu teori negara hukum sebagai *grand theory*, teori keadilan dan sistem peradilan pidana sebagai *middle range theory*, dan teori pemidanaan sebagai *applied theory*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan yuridis penjatuhan sanksi dibawah batas minimum pada tindak pidana gratifikasi sebelum memutus perkara suatu tindak pidana harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu dengan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang dan tidak ada alasan pemaaf baginya.hakim memiliki kekuasaan penuh dalam memutus suatu perkara berdasarkan keyakinannya dan dikuatkan oleh peraturan dalam KUHAP, undang-undang kekuasaan kehakiman, dan yurisprudensi. Akibat hukum jika putusan hakim dijatuhkan dibawah sanksi pidana minimum khusus pada amar putusan bisa terjadi upaya pencegahan korupsi menjadi terhambat, tidak ada efek jera, karena rendahnya putusan. Apabila putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dengan melewati segala pertimbangan yang matang akan banyak timbul problem yang terjadi baik dimasyarakat ataupun tubuh peradilan sendiri sehingga ketidakpercayaan terhadap peraturan sangat sedikit bahkan bisa luntur.

Kata Kunci : Minimum Limit, Gratifikasi, Pemidanaan.

## ABSTRACT

### **AIS SURASA. "Imposition of Crime Below the Minimum Limit in the Crime of Gratification Related to the Purpose of Criminalization."**

This research is motivated by the fact that the imposition of crimes under a special minimum criminal sanction in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, in this case specifically regarding gratification on the basis of which is not justified under articles 12B and 12C. However, the fact is that many judges have imposed criminal sanctions below a special minimum, as in the case of the Supreme Court Decision No. 1136.K / PID.SUS / 2012 in this study. This is deemed incompatible with the purpose of punishment to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption, especially gratification.

The purpose of this study focuses on: how the juridical reasons for imposing sanctions below the minimum limit on the crime of gratification are related to the purpose of punishment and what the legal consequences are if the judge's decision is imposed under special minimum criminal sanctions.

The research method used is normative juridical research, which is research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law. This study uses primary data sources, namely the results of direct observations and interviews with resource persons who have competence in issues related to the effect of criminal charges against Judges in convicting criminal charges and the purpose of punishment and secondary data sources which include primary legal data, secondary legal law, and data. tertiary law. The theory in this research is by using three theories, namely the theory of the rule of law as a grand theory, the theory of justice and the criminal justice system as a middle range theory, and criminal theory as an applied theory.

The results show that the juridical reasons for imposing sanctions below the minimum limit on the crime of gratification before deciding a case of a criminal act must pay attention to every important thing in the trial. The judge examines a criminal act committed by a person with due observance of subjective conditions, namely by the existence of an error, the ability to be responsible for a person and there is no excuse for him. The judge has full power in deciding a case based on his belief and is strengthened by the regulations in the Criminal Procedure Code, the judicial power law. , and jurisprudence. The legal consequence is that if a judge's verdict is passed under a special minimum criminal sanction at the time of the verdict, efforts to prevent corruption will be hampered, there will be no deterrent effect, because of the low verdict. If the verdict is not in accordance with the provisions that should have passed all careful considerations, there will be many problems that occur both in the community and the judiciary itself so that the distrust of the regulations is very little and can even disappear.

Keywords : Minimum Limit, Gratification, Punishment